

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 23 tahun 2014). Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah.

Sebagai organisasi yang tidak berorientasi mencari keuntungan, pemerintah daerah mempunyai tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, infrastruktur, dan penyediaan barang kebutuhan masyarakat. Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi membuka jalan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya (Mahmudi, 2010). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan, selain itu laporan keuangan juga memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang

nantinya akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dengan cara analisis rasio keuangan daerah terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rasio keuangan yang digunakan antara lain: rasio efektivitas, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian. Dalam menganalisis kinerja keuangan daerah dapat menggunakan beberapa metode alat perhitungan yaitu cross-section, time-series, commonsize, dan indeks/trend.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan sebelumnya dan setelah itu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana belanja daerah yang dimiliki untuk belanja rutin dan belanja pembangunan (Halim, 2012: 221-234).

Rasio pertumbuhan menggambarkan apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan atau selama beberapa periode kinerjanya mengalami pertumbuhan atau tidak (Mahmudi, 2010: 138).

Sedangkan rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dengan catatan semakin tinggi rasio semakin rendah tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat (Halim, 2012: 221-234).

Secara keseluruhan, stabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta cukup baik dan relatif terjaga. Hal tersebut dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun antara tahun 2013 sampai tahun 2017. PAD tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Sleman dengan jumlah 3.208.526.911.964, tertinggi kedua adalah Kota Yogyakarta dengan jumlah 2.561.795.873.559, ketiga adalah Kabupaten Bantul dengan jumlah 1.870.727.884.846, keempat adalah Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah 916.479.939.251 dan yang terendah adalah Kabupaten Kulonprogo dengan jumlah 855.403.778.907.

Alasan penulis memilih Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta untuk dijadikan sebagai bahan penelitian yaitu karena Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah wisata, sehingga cukup menarik untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rigel Nurul Fathah (2017). Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada tempat dan tahun penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya tempat penelitian berada Kabupaten Gunung Kidul tahun anggaran 2010-2014, sedangkan pada penelitian ini tempat penelitiannya di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta Tahun 2013-2017.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH**

**DAERAH KABUPATEN/KOTA EKS KARESIDENAN
YOGYAKARTA TAHUN 2013-2017.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti dapat menetapkan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta jika dilihat dari Rasio Efektivitas?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta jika dilihat dari Rasio Keserasian?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Yogyakarta jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta jika dilihat dari Analisis Commonsize dan Indeks/Trend?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta jika dilihat dari Rasio Efektivitas.

2. Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta jika dilihat dari Rasio Keserasian.
3. Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan.
4. Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
5. Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta jika dilihat dari Analisis Commonsized dan Indeks/Trend.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta jika dilihat dari Rasio Efektivitas, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah serta Analisis Commonsized dan Indeks/Trend.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh penerapan teori Rasio Efektivitas, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio

Kemandirian Keuangan Daerah untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan dan kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta serta dapat melihat kinerja keuangan daerah tersebut dengan menggunakan analisis commonsize dan indeks.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemerintah daerah dalam menganalisis kinerja keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perkembangan zaman yang semakin modern.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian antara lain Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian antara lain laporan keuangan daerah, pedoman penyusunan APBD, komponen laporan keuangan, kinerja keuangan daerah, analisis kinerja keuangan daerah, analisis rasio keuangan, teknik analisis perbandingan, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian antara lain desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian antara lain hasil penelitian yang dilakukan peneliti disertai penjelasan mengenai gambaran umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Yogyakarta. Selain itu juga membahas tentang analisis data dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran hasil penelitian.